

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan modal utama bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Melalui pendidikan, masyarakat akan lebih produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, Pendidikan tidak hanya menghasilkan *hard skill* saja tetapi, melalui pendidikan *soft skill* seseorang juga akan terbentuk dengan sendirinya.

Pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengharuskan perlunya dilakukan pemerataan pendidikan. Akibat dari pendidikan yang belum merata menyebabkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi rendah, produktivitas juga rendah, maka pendapatanpun rendah. Rendahnya pendapatan menyebabkan daya beli yang kurang, kemiskinan meningkat, serta ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Kondisi inilah yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya diarahkan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta rata-rata nilai saja, tetapi pendidikan harus juga merata sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat (Tomul, 2009).

Secara konseptual, istilah pemerataan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi

kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Sismanto, 2003). Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Dalam hal ini, pemberian kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua penduduk di setiap daerah tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, *gender*, ras, dan sebagainya merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Sehingga, pemerataan pendidikan harus benar-benar diutamakan agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Ketimpangan pendidikan merupakan ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi (Yagami, 2013). Artinya pembangunan pendidikan harus merata tanpa perbedaan apapun, agar rakyat atau masyarakat dapat menikmati pendidikan yang layak dan bermutu.

Studi tentang ketimpangan pendidikan akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi di berbagai negara yang mencoba menganalisis pemerataan pendidikan berdasarkan lokasi, antar *gender*, antar wilayah bahkan antar negara. Studi tersebut diantaranya dilakukan (Castello dan Domenech, 2002; Mesa, 2005; Qian dan Smyth, 2008; Thomas et al, 2001). Indikator yang digunakan dalam penentuan distribusi tingkat pendidikan dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin, unit perumahan dan kelompok pendapatan, tingkat

melek huruf, angka partisipasi sekolah, rata-rata sekolah, standar deviasi, *Generalized Entropy*, indeks Gini dan indeks Theil (Mesa, 2005; Siddhanta dan Nanday, 2003; Thomas et al, 2001; Thomas et al, 2002).

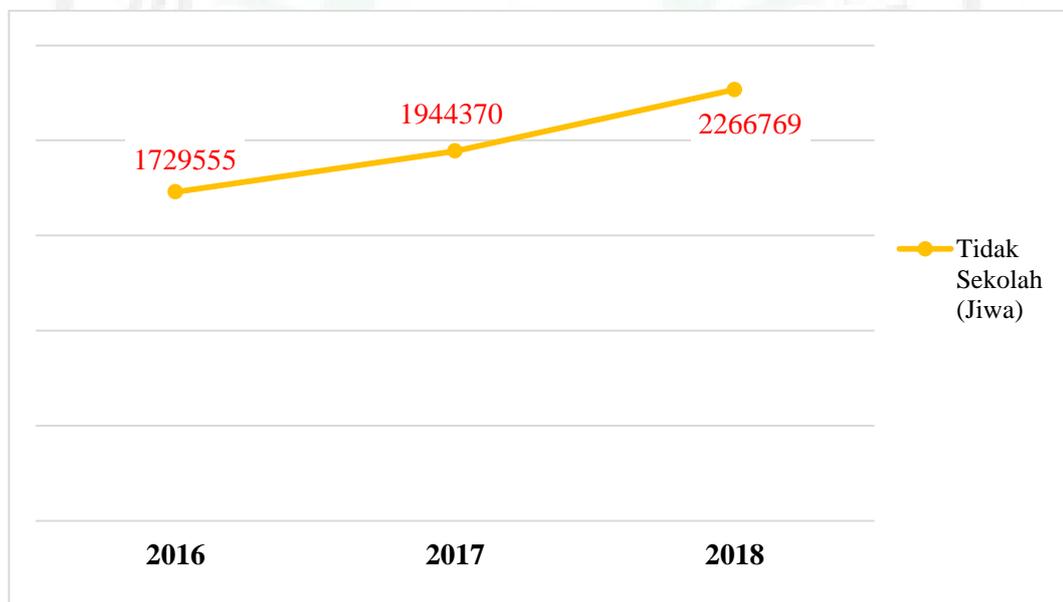
Terdapat beberapa hasil studi empiris tentang keterkaitan antara tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk dengan ketimpangan pendidikan, dimana ukuran ketimpangan pendidikan berbeda-beda. Ram (1990), Park (1996), Thomas et al (2001) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan standar deviasi sekolah (pemerataan pendidikan) dengan pola U-terbalik (*inverted-U*). Studi ini mengkonfirmasi konsistensi kurva Kuznet pendidikan. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang berakibat rendahnya pendidikan yang di dapat masyarakat. Namun, bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped patern*). Penurunan kemiskinan dan semakin meratanya pendapatan berarti terjadi peningkatan kesejahteraan yang berakibat pada peningkatan pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Ketimpangan pendidikan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmerataan pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Ketimpangan pendidikan menjadi sangat penting dalam mengetahui efektifitas dari sistem pendidikan dan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi proses pendidikan. Beberapa alasan mengapa ketimpangan pendidikan menjadi hal yang perlu untuk diteliti karena adanya keterkaitan kesejahteraan dan efisiensi. Dari sisi

kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas mampu meningkatkan kemampuan individu dalam memperkuat kesejahteraannya secara langsung. Meskipun masih ditemui adanya *gap* pendidikan antara si kaya dan si miskin (Thomas, 2001). Jika kondisi kemiskinan dianggap sebagai “perampasan dari pemenuhan kebutuhan minimum pendidikan yaitu sekolah dasar”, maka ketimpangan kesejahteraan harus memasukkan ukuran ketimpangan pendidikan (Sen, 2000).

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian pemerintah dan *stakeholder* pendidikan, terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, pemerintah sejak lama telah mengupayakan pendidikan secara merata dan adil bagi masyarakatnya. Kebijakan wajib belajar 9 tahun telah diterapkan sejak tahun 1988 kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang wajib belajar 9 tahun bagi warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat. Konsekuensinya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pemerintah telah menyediakan dana bantuan operasional (BOS) pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Meskipun kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakatnya untuk menempuh pendidikan dasar sejak lama dan menanggung biaya pendidikan dasar (pendidikan dasar gratis), tetapi hasil yang diperoleh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang tidak bersekolah walaupun sudah memasuki usia sekolah. Berikut jumlah siswa yang tidak bersekolah di Indonesia dari tahun 2016-2018.



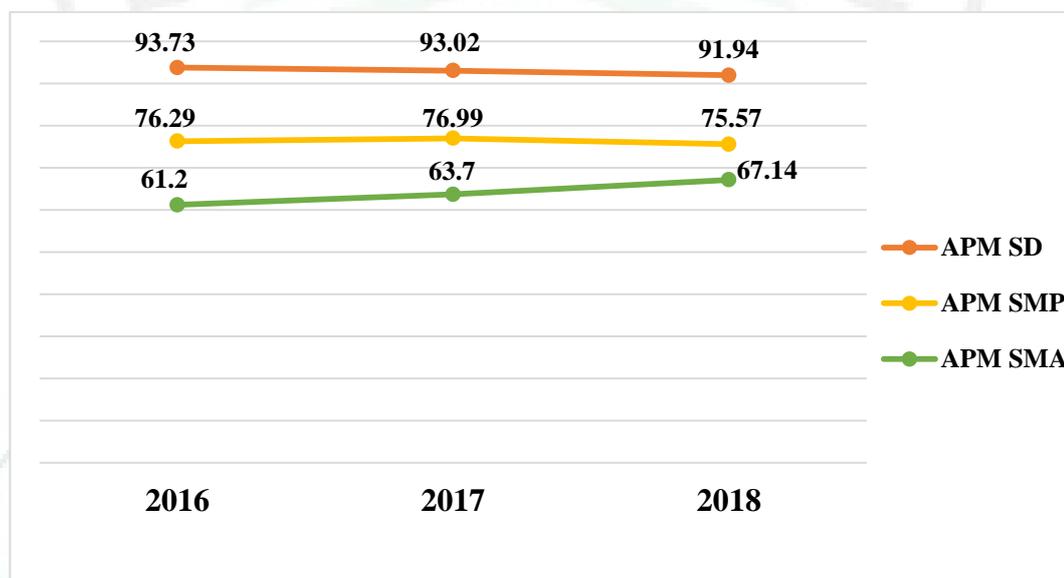
Sumber: Kemendikbud (2019)

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Siswa yang Tidak Sekolah di Indonesia**

Dari grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tidak bersekolah di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2018 yang merupakan titik tertinggi selama 3 tahun terakhir dengan penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah berjumlah 2.266.769 jiwa atau sekitar 8,06%. Banyaknya penduduk yang tidak mengenyam pendidikan dasar ini

mengindikasikan masih belum meratanya pendidikan di Indonesia dan kurangnya kinerja pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam pemerataannya.

Menurut Thomas (2001) indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan pendidikan adalah partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dan rata-rata lama sekolah masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk bersekolah dilihat dari angka partisipasi masyarakat, baik Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Berikut data Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat.



Sumber: Kemendikbud (2019)

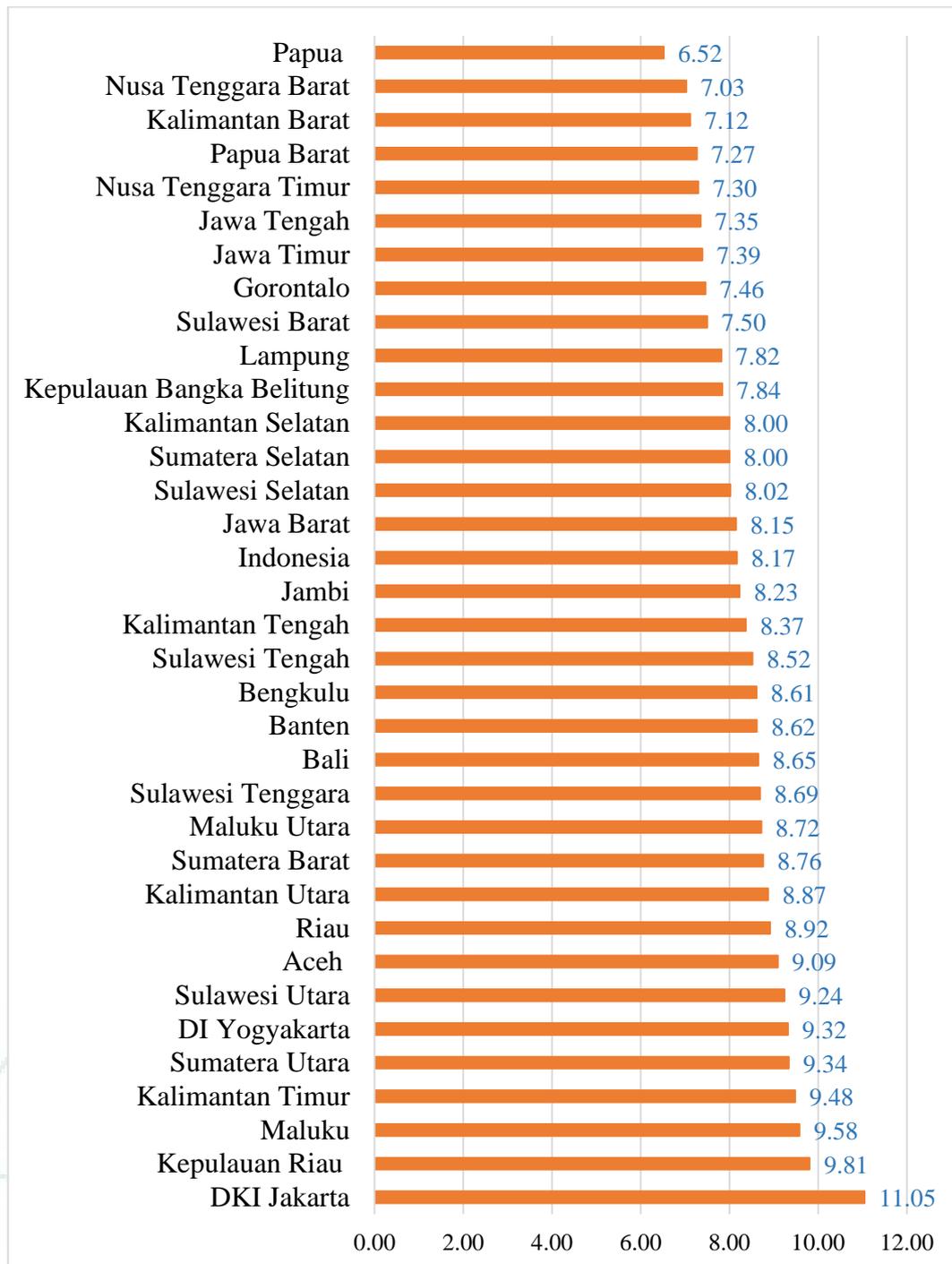
**Grafik 1.2**  
**APM di Indonesia Tahun 2016-2018**

Dari grafik 1.2 di atas dapat dilihat bahwa APM SD/ sederajat di Indonesia dari tahun 2016–2018 mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Untuk APM

SMP/ sederajat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 76,99 yang sebelumnya sebesar 76,29. Tetapi, mengalami penurunan kembali di tahun 2018 menjadi 75,57. Sedangkan untuk APM SMA/ sederajat dari tahun 2016-2018 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Menurut BPS (2019) cara yang dapat dilakukan untuk mengukur pemerataan pendidikan di Indonesia adalah dengan melihat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SD/ sederajat dan Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat SMP/ sederajat mencapai 95. Tetapi, dari data di atas hal ini masih belum tercapai di Indonesia.

Selain itu, indikator lainnya yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Dengan melihat rata-rata lama sekolah juga dapat mengetahui sejauhmana program wajib belajar 9 tahun telah terlaksana dengan baik atau belum. Berikut adalah data Rata-rata Lama Sekolah yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia menurut provinsi tahun 2018.

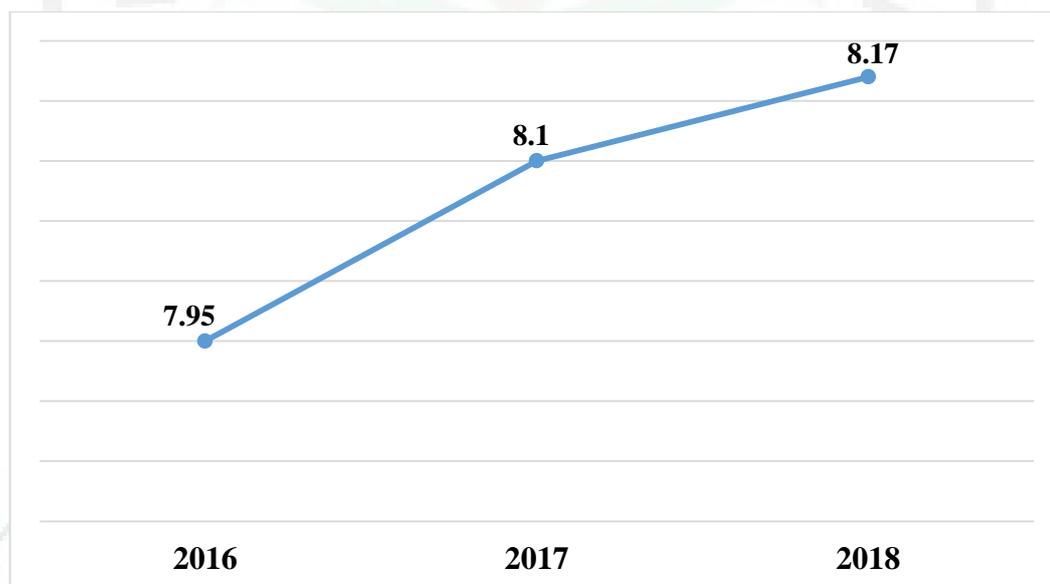


Sumber: Kemendikbud (2019)

**Grafik 1.3**  
**Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018**

Dari Grafik 1.3 diketahui bahwa hanya 8 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang sudah mampu melaksanakan program wajib belajar, yang dilihat dari rata-rata lama sekolah yang sudah mencapai angka 9. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena sebagian besar masyarakat berusia 15 tahun ke atas belum mampu memenuhi pendidikan dasar. Bahkan di provinsi Papua masyarakatnya hanya mampu memenuhi pendidikannya pada jenjang SD.

Selain itu, perkembangan rata-rata lama sekolah di Indonesia selama tahun 2016-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti terlihat pada grafik 1.4 berikut ini:



Sumber: Kemendikbud (2019)

**Grafik 1.4**  
**Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia**

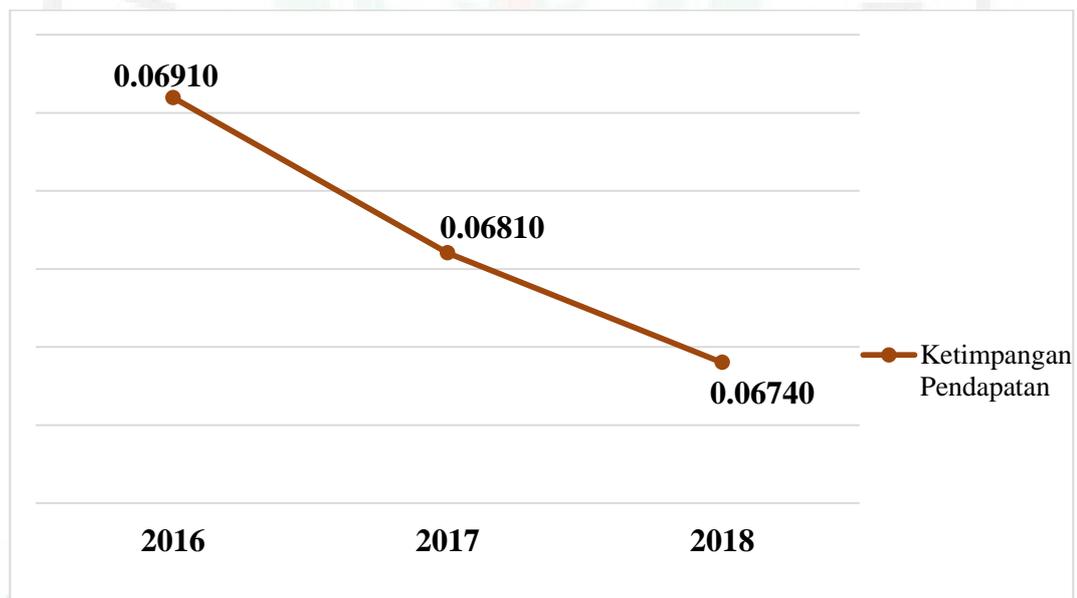
Dari grafik 1.4 di atas dapat dilihat RLS di Indonesia selama 3 tahun terakhir terus meningkat setiap tahunnya. Tetapi peningkatannya masih jauh dari yang diharapkan. Walaupun pencapaian rata-rata lama sekolah Indonesia dari tahun 2016 – 2018 menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Namun,

peningkatan capaian pendidikan tersebut belum tentu mengimplikasikan pendidikan yang sudah merata. Thomas et al. (2001) menyatakan bahwa indikator pendidikan kurang efektif dalam menggambarkan ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu perlu ukuran ketimpangan pendidikan lainnya seperti indeks gini pendidikan yang juga dapat digunakan sebagai pelengkap indikator kesejahteraan. Dengan mengetahui angka indeks gini pendidikan pada setiap provinsi-provinsi di Indonesia, sehingga pemerintah dapat mengklasifikasikan setiap provinsi termasuk dalam ketimpangan pendidikan tinggi, sedang dan kecil. Dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di daerah tersebut.

Shapiro (1999) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Congo yaitu *Gender*, Kemiskinan dan Struktur Keluarga. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan Senadza (2012) mengatakan bahwa Gender, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendidikan di Ghana.

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitasnya. Ketimpangan pendapatan akan menjadi masalah, jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dirasakan oleh sebagian kecil penduduk. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser 2006).

Ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi tingkat pendidikan (Kaplan et al, 1996 dan Sylwester, 2000). Ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung mengeluarkan anggaran yang lebih kecil untuk pendidikan sehingga mutu pendidikan menjadi kurang bagus. Salah satu alasan mengapa wilayah dengan tingkat kesenjangan yang tinggi menghabiskan sedikit anggaran untuk pendidikan adalah di wilayah dengan kesenjangan yang meningkat, terjadi perbedaan prioritas antara orang kaya dengan mayoritas warga lainnya (Kaplan et al, 1996). Berikut data ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2016-2018.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

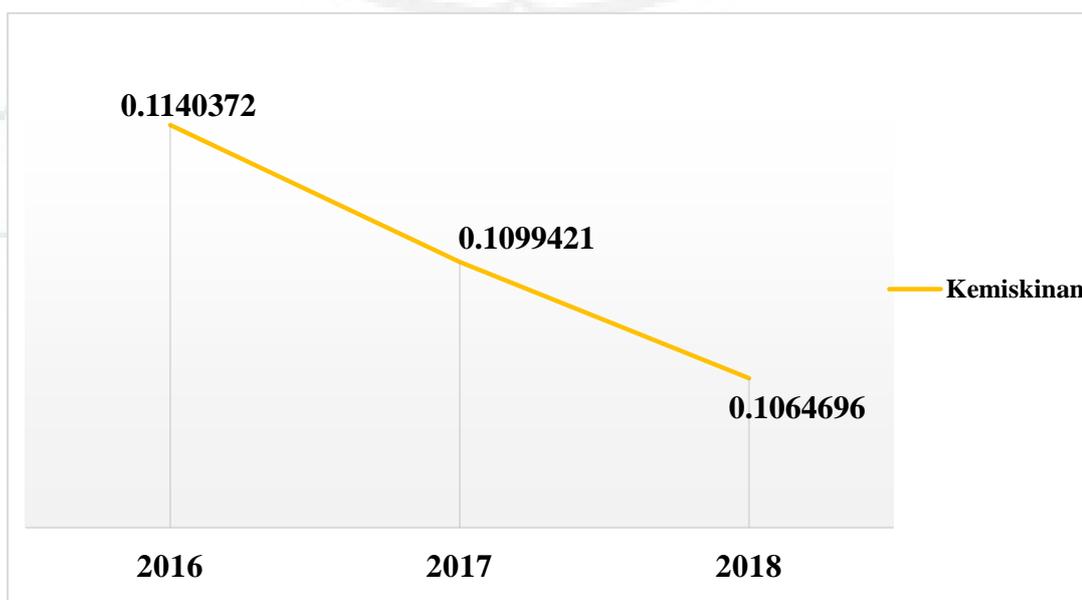
**Grafik 1.5**  
**Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Indonesia**

Dari Grafik 1.5 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia yang diukur dengan Indeks Williamson selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya, walaupun penurunannya tidak terlalu besar. Penurunan indeks gini ini mengindikasinya semakin meratanya

pendistribusian dari pendapatan yang diterima masyarakat antar daerah di Indonesia.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendidikan telah dilakukan oleh Ariutama dan Syahrul (2014) dan Sylwester (2000). Hasil penelitian menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan menyebabkan ketimpangan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan semakin mengecil

Kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan. Kemiskinan memiliki dampak yang besar terhadap permintaan untuk sekolah dan mendaftar sekolah. Anak-anak dari rumah tangga yang miskin akan cenderung menunda masuk sekolah dan cenderung meningkatnya angka putus sekolah yang akan memperlambat pencapaian tingkat pendidikan yang merupakan konsekuensi dari rumah tangga miskin, sehingga tingkat pencapaian pendidikan bagi warga miskin akan rendah (Shapiro et al, 2001). Berikut data kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2018.



**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019**

**Grafik1.6**  
**Kemiskinan di Indonesia**

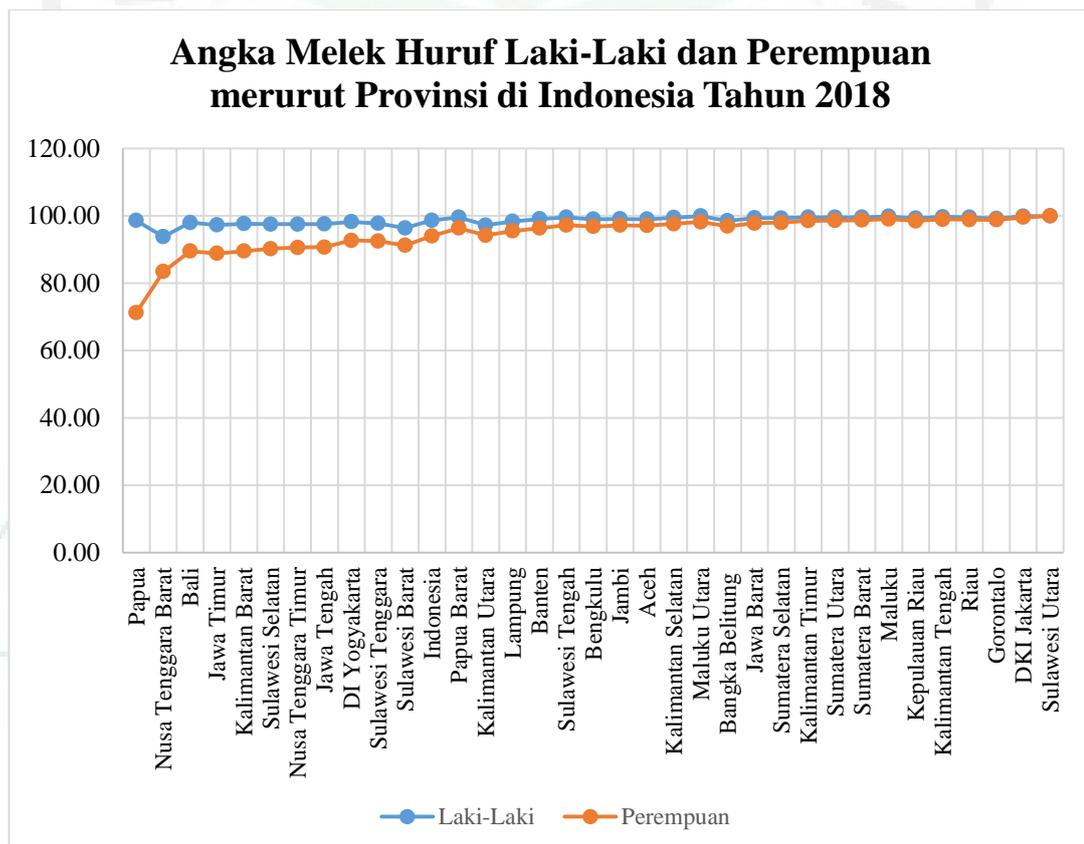
Dari Grafik 1.6 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan angka kemiskinan berarti jumlah penduduk yang dibawah garis kemiskinan semakin berkurang setiap tahunnya.

Beberapa kajian empiris sebelumnya yang terkait dengan pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap pendidikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga merupakan penentu yang signifikan bagi anak-anak untuk bersekolah. Karena faktor ekonomi keluarga yang miskin, orangtua lebih mengharapkan anak-anaknya untuk membantu perekonomian keluarga sehingga angka putus sekolah tinggi yang berimplikasi pada peningkatan ketimpangan pendidikan (Shapiro et al, 2001; Suryadarma dkk, 2006; Grim, 2011; Psachoropoulos dan Arriagada, 2016).

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Perluasan kesempatan belajar di Sekolah Dasar (SD) mulai dilakukan secara lebih intensif sejak tahun 1973. Usaha perluasan ini dilaksanakan melalui pemerataan berbagai fasilitas pendidikan. Pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 (enam) tahun pada tahun 1984 dan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun pada tahun 1994. Kedua program tersebut secara bertahap telah berhasil memperluas angka partisipasi pada tingkat pendidikan dasar. Pada tahun

2018 Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 91,94% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP mencapai 75,57%. Hal ini berarti 75,57% penduduk Indonesia telah menempuh pendidikan minimal 9 tahun.

Walaupun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses pendidikan menurut jenis kelamin. Namun, dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar. *Gender gap* dapat ditunjukkan dari rasio angka melek huruf laki-laki dengan angka melek huruf perempuan. Berikut data angka melek huruf laki-laki dan perempuan di Indonesia menurut provinsi tahun 2018:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

**Grafik 1.7**  
**Angka Melek Huruf Laki-laki dan Perempuan menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018**

Dari grafik 1.7 diketahui ada 11 provinsi yang memiliki angka melek huruf laki-laki dan angka melek huruf perempuan pada tahun 2018 di bawah angka melek huruf nasional yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Jika dilihat dari kesebelas provinsi tersebut, 4 provinsi berada di bagian barat Indonesia (provinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat), 6 provinsi di bagian tengah Indonesia (provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat) dan 1 provinsi di Indonesia bagian timur yaitu provinsi Papua. Hal ini berarti *gender gap* Pendidikan Indonesia tersebar luas di seluruh bagian di Indonesia.

Digdowiseiso (2010) dan Bustomi (2012) menyatakan bahwa besarnya perbedaan angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingginya indeks gini pendidikan. Semakin lebar kesenjangan *gender* maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendidikan. Penelitian lainnya yang meneliti tentang kesenjangan *gender* dengan pendidikan adalah (Thomas, 2001) yang menunjukkan bahwa *gender gap* pendidikan berhubungan positif dengan ketimpangan pendidikan. Penurunan *gender gap* dalam sektor pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di 85 negara penelitian. Setiap upaya untuk mengurangi ketimpangan

pendidikan harus bertujuan untuk mempersempit kesenjangan gender (Senadza, 2012).

Dari permasalahan tersebut, masih belum meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat untuk pendidikan dasar yang menurun dan belum terlaksananya wajib belajar 9 tahun yang dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah. Sehingga pentingnya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia yang diukur dengan indeks gini pendidikan. Maka, penelitian ini akan melakukan pengukuran ketimpangan pendidikan melalui koefisien gini pendidikan tahun 2016-2018 untuk 34 provinsi-provinsi di Indonesia. Sehingga judul penelitian ini adalah “**Analisis Determinan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2018?
3. Bagaimana pengaruh *Gender Gap* Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2018?

4. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan *Gender Gap* Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2018?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Gender Gap* Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan *Gender Gap* Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia tahun 2016-2018.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi perkembangan ilmu ekonomi terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis:

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi saat pemerintah akan membuat kebijakan dalam mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengetahui kondisi ketimpangan pendidikan di Indonesia.

### c. Bagi Akademiks

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dalam cabang ilmu ekonomi regional sekaligus sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya.